

OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN MODERNISASI PAJAK DI BADAN PENDAPATAN DAERAH JABAR

Arry Irawan

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Jl.Gegerkalong Hilir,

Ds.Ciwaruga, Bandung 40012

E-mail : arry.irawan@polban.ac.id

Abstract

The problem of regional autonomy is the ability of local government financing. One of the elements of regional revenue is regional own-source revenue (PAD). So regional own-source revenue (PAD) will be the main pillar. Vehicle Tax is the dominant Regional Tax, because every person or entity that owns or controls a vehicle is obliged to pay its tax. Therefore, the Regional Revenue Agency of West Java Province, seeks to optimize the vehicle tax revenue by implementing the modernization of vehicle tax. The purpose of this study was to analyze the West Java Regional Revenue Agency program in the context of optimization vehicle tax revenue with tax modernization including the obstacles faced by West Java Regional Revenue Agency. The type of research used is descriptive qualitative. The population of this study is the vehicle taxpayers of private ownership. The sample is determined by the incidental sampling method of 100 respondents. The data collection method used in this study is a questionnaire, this research is expected to provide input to West Java Regional Revenue Agency who is optimizing vehicle tax revenue. The results of this study indicate that the modernization of vehicle tax from the aspect of payment innovation, hardware aspects and Human Resource aspects are in the very good category, even though there are cultural obstacles that are not familiar with cashless payments and the use of applications for tax payments.

Keywords: *Optimization of PKB revenue, tax modernization, West Java Regional Revenue Agency (Bapenda)*

Abstrak

Permasalahan otonomi daerah adalah kemampuan pembiayaan pemda. Unsur penerimaan daerah terbesar adalah pendapatan asli daerah (PAD). Jadi Pendapatan asli daerah (PAD) akan menjadi penopang utama otonomi daerah. Pajak kendaraan bermotor ditujukan kepada siapa saja yang menjadi wajib pajak baik bersifat perorangan maupun badan karena kepemilikan kendaraan bermotor. Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat untuk mencari cara terbaik untuk digunakan meningkatkan pendapatan pajak, salah satunya adalah dengan mengimplemetasikan modernisasi pajak kendaraan bermotor. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis program Bapenda Jabar dalam optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan modernisasi pajak termasuk kendala yang dihadapinya. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor kepemilikan pribadi. Sampel ditentukan dengan metode *incidental sampling* sebanyak 100 responden. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, Penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada Bapenda dalam melakukan optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini menunjukkan modernisasi pajak kendaraan bermotor dari aspek inovasi pembayaran, aspek perangkat keras dan aspek SDM berada pada kategori sangat baik, meskipun terdapat kendala budaya masyarakat yang belum familiar dengan pembayaran cashless dan penggunaan aplikasi untuk pembayaran pajak.

Kata Kunci: *Optimalisasi pendapatan PKB, Modernisasi pajak kendaraan bermotor, Bapenda Jabar*

PENDAHULUAN

Tumbangnya rezim orde baru pada tahun 1998 merubah wajah pemerintahan Indonesia dari Pemerintahan yang bersifat sentralistik menjadi pemerintahan yang bersifat desentralisasi. Pemerintahan yang bersifat desentralisasi menjadikan pemerintah daerah sebagian besar menjadi daerah otonom. Salah satu masalah yang dihadapi pemerintah daerah yang otonom adalah tuntutan kemampuan untuk melayani keinginan dan harapan masyarakat untuk kesejahteraan bersama. Agar keinginan dan harapan tersebut dapat tercapai, tentu harus diiringi dengan kemampuan pendanaan dalam pembangunan. Pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan akan dana pembangunan baik dari bantuan pemerintah pusat maupun mengusahakan sendiri secara mandiri. Yang dananya berasal dari usaha secara mandiri disebut sebagai penerimaan daerah, dan jika berasal dari potensi yang dimiliki sendiri oleh pemerintah daerah yang bersangkutan disebut dengan pendapatan asli daerah (PAD).

Menurut Darmanto (2016), Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) diharapkan akan mampu mendukung perkembangan perekonomian daerah. Meningkatnya pendapatan asli daerah akan berdampak pada suksesnya otonomi daerah sehingga pemerintah pusat tidak terlalu terbebani dengan masalah pendanaan. Jadi Pendapatan asli daerah (PAD) akan menjadi penopang utama terselenggaranya otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

Semua pemerintah daerah di Indonesia dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)nya masing-masing. Pendapatan asli daerah yang besar akan mencukupi untuk mampu menjamin terselenggaranya pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. Pajak daerah hingga saat ini menjadi sumber pendapatan yang paling dominan dalam pos Pendapatan asli daerah. Di banyak pemerintahan daerah, pajak kendaraan bermotor menjadi penyumbang terbesar pajak daerah. Pendapatan per kapita Indonesia yang terus naik dari waktu ke waktu mendorong kepemilikan atas kendaraan pribadi menjadi meningkat sangat pesat. Atas kepemilikan kendaraan bermotor, maka pemerintah daerah Tingkat I (provinsi) berhak untuk memungut Pajak kendaraan bermotor melalui Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak kenal bosan untuk terus mengimbau para wajib pajak kendaraan bermotor, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan agar memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotornya dan meningkatkan kepatuhannya tersebut. Agar masyarakat pemilik kendaraan bermotor kian patuh memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Barat terus berbenah diri. Mereka tak kenal henti terus berinovasi dengan sistem baru yaitu sistem administrasi modern pajak kendaraan bermotor. Tuntutan wajib pajak agar pembayaran

pajak kendaraan bermotor makin mudah,praktis dan tidak membutuhkan waktu lama, dijawab pemerintah dengan meluncurkan program sistem administrasi perpajakan modern melalui e-samsat, yang memungkinkan wajib pajak tidak perlu datang langsung untuk membayar pajak, tapi bisa mempunyai banyak pilihan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Rumusan Masalah

1. Apa program yang dilakukan oleh Bapenda Jawa Barat dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB)
2. Apa yang menjadi Kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB)

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis program Bapenda Jabar dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan melakukan modernisasi pajak termasuk kendala yang dihadapi oleh Bapenda Jabar.

Optimalisasi memiliki pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Depdikbud (2016) adalah "optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi jadi optimalisasi adalah suatu proses meninggikan atau meningkatkan. Pengertian Optimalisasi menurut Hysocc (2020) yaitu sebagai berikut:

Memiliki cangkupan sama dengan pengertian "Optimasi yaitu suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimasi (nilai efektif yang dapat dicapai). Optimasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan sesuatu hal yang sudah ada, ataupun merancang dan membuat sesuatu secara optimal".

Pajak kendaraan Bermotor menurut Samudra (2015) adalah sebagai berikut:

“Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor tidak termasuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak digunakan sebagai alat angkutan orang dan/atau barang di jalan umum”.

Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 4 ayat (1) yang dimaksud Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Dalam pasal 5 ayat (1) yang dimaksud Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi, badan, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor(PemprovJabar,2011)

Menurut Rahayu (2015), modernisasi sistem administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk menerapkan good governance dan pelayanan prima kepada masyarakat. Sedangkan definisi menurut Pandiangan [2008] Good governance, merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak.

Menurut Ismawan (2010) Sistem administrasi perpajakan modern adalah suatu proses reformasi pembaharuan dalam bidang administrasi perpajakan yang dilakukan warga komprehensif, meliputi aspek teknologi informasi yaitu perangkat lunak, perangkat keras dan sumber daya manusia. Aspek teknologi informasi dilakukan dengan cara melibatkan kecanggihan teknologi saat ini untuk makin meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan makin meningkatnya kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak kendaraan bermotor makin tinggi, sehingga akan berdampak kepada kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi secara mandiri kebutuhan dana untuk pembangunan. Inovasi teknologi akan membuat banyak terobosan sistem pelayanan yang mudah untuk diakses oleh wajib pajak kendaraan bermotor.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang akan menjelaskan dan menunjukkan secara teratur bukti dan kendala yang ada di lapangan. Sesuai rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian deskriptif yang tujuannya menunjukkan dan memberikan gambaran yang jelas tentang adanya suatu fenomena.

Adapun tujuan penelitian ini untuk melakukan evaluasi implementasi optimalisasi Penerimaan PKB, yaitu implementasi modernisasi pajak, kendala yang dihadapi di lapangan dan solusi untuk mengatasinya serta kontribusinya dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah Jawa Barat.

Populasi

Menurut Sugiyono (2014) populasi adalah wilayah generalisasi, obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor kepemilikan pribadi yang terdaftar di Kantor Samsat Soekarno Hatta. Jumlah wajib pajak kendaraan bermotor kepemilikan pribadi pada saat program modernisasi pajak dijalankan sebanyak 536.853 Wajib Pajak.

Sampel

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah *nonprobability sampling* dengan teknik sampling yang akan digunakan adalah *accidental sampling/sampel insidental*. Menurut Sugiyono (2014), sampel insidental adalah sampel yang ditemukan secara kebetulan tanpa disengaja dan menurut penilaian cocok sebagai responden. Metode yang dipakai dalam menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah rumus Slovin. Batas toleransi kesalahan pada penelitian ini adalah 10 persen. Semakin kecil toleransi kesalahan, semakin akurat sampel menggambarkan populasi. Dengan jumlah populasi yang sama, semakin kecil toleransi kesalahan, semakin besar jumlah sampel yang dibutuhkan. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus slovin, maka jumlah sampel pada penelitian ini dengan jumlah populasi 536.853 dan error tolerance (batas toleransi kesalahan) 10 %, maka jumlah sampel adalah 99,71 atau sebanyak 100 responden.

Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini data dikumpulkan dengan cara observasi, dokumentasi, studi pustaka dan wawancara.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini menggunakan model interaktif menurut Miles dan Huberman (2002) mengungkapkan "bahwa analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi".

Tahapan Proses Analisis Data:

1. Pembagian Kuesioner kepada para Wajib Pajak yang terdaftar pada SAMSAT Soekarno Hatta yang merupakan wilayah dengan jumlah Wajib pajak terbanyak pada Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat. Untuk mengukur pendapat responden menggunakan skala Likert 4 point yaitu: Selalu, sering, jarang dan tidak pernah.
2. Melakukan wawancara dengan para aparaturnya pajak kendaraan bermotor yang bertugas di Samsat Soekarno Hatta Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat untuk menggali informasi lebih mendalam tentang kendala yang dihadapi dan solusi yang diambil modernisasi perpajakan yang dijalankan oleh Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat.
3. Mengukur kategori rekapitulasi skor tanggapan mengenai aspek yang diteliti, penulis melihat presentase antara skor penelitian dengan skor ideal. Skor ideal didapat dari jumlah responden dikalikan dengan jumlah kategori. Sedangkan untuk menentukan kategori, penulis melihat dari skor kriterium, dimana skor

tertinggi yaitu $(4:4) \times 100=100$ dan skor terendah yaitu $(1:4) \times 100=25$, lalu kelas interval sebesar $((100-25)/4)=18,75$ maka diperoleh kategori yang penulis tetapkan sebagai berikut:

Tabel 1
Kategori Rekapitulasi Skor Tanggapan

Skoring Persentase	Kategori	Kategori	Kategori
Presentase	Aspek Inovasi Pembayaran (Software)	Aspek Perangkat Keras(Hardware)	Aspek SDM (Brainware)
25% - 43,75%	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk
43,76% - 62,5%	Buruk	Buruk	Buruk
62,6% - 81,25%	Baik	Baik	Baik
81,26% - 100%	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

4. Melakukan analisis deskriptif untuk mengetahui gambaran umum tentang aspek yang digunakan dalam penelitian tersebut. Analisis statistika deskriptif ini menggunakan nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standard deviasi atas jawaban responden dari setiap aspek yang ditanyakan.
5. Melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan data hasil kuesioner yang akan diperkuat dengan hasil wawancara dengan aparat perpajakan pada Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat.

Hasil Uji Validitas

Uji ini digunakan dengan cara membandingkan R hitung dengan R tabel. Uji ini bisa disebut valid seandainya tingkat signifikansinya dibawah 0,05 dan juga saat R hitung ternyata lebih besar dari R Tabel. Pada penelitian ini, dapat diambil kesimpulan semua indikator pertanyaan yang digunakan adalah valid, karena R Hitung dari setiap indikator lebih besar daripada R tabel (0,1966) dan dapat dikatakan valid juga karena tingkat signifikan kurang dari 0,05.

Hasil Uji Reliabilitas

Pada penelitian ini, karena setiap variabel memiliki Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60, maka bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini reliabel

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2
Karakteristik Responden berdasarkan Inovasi Pembayaran
Pajak yang Sering digunakan

Inovasi Pembayaran	frekuensi	persentase
Samsat Keliling	79	79
Samsat Masuk Desa	3	3
E-Samsat	12	12
Samsat Mobile Jabar	6	6
Total	100	100

Dari data karakteristik responden berdasarkan inovasi pembayaran pajak yang sering digunakan pada tabel diatas, maka jumlah responden terbesar adalah responden Samsat Keliling yaitu sebanyak 79 orang atau 79%. Sedangkan jumlah responden terendah adalah responden Samsat Masuk Desa yaitu sebanyak 3 orang atau 3%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden sering menggunakan inovasi pembayaran pajak Samsat Keliling.

Aspek Inovasi Pembayaran (*Software*)

Responden memberikan tanggapan terhadap Aspek Inovasi Pembayaran (*Software*) nilai minimum sebesar 30, sedangkan nilai maksimum sebesar 80. Nilai rata-rata (*mean*) Aspek Inovasi Pembayaran (*Software*) adalah 61,03 dengan standar deviasi sebesar 12,646. Nilai rata-rata tersebut dapat diartikan bahwa dari skala 1-4, range jawaban responden pada Aspek Inovasi Pembayaran (*Software*) terletak antara selalu dan sering. Sedangkan standar deviasi sebesar 12,646 menunjukkan bahwa penyimpangan data tersebut kecil karena standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata. Berdasarkan hasil rekapitulasi skor tanggapan dari menunjukkan bahwa Aspek Inovasi Pembayaran (*Software*) tergolong masuk ke dalam kategori baik dan sangat baik. Hanya dari penggunaan dan sosialisasi layanan SAMBARA dan E-Samsat yang masuk kedalam kategori buruk, hal ini karena karakteristik responden mayoritas sering menggunakan layanan pembayaran samsat keliling.

Aspek Perangkat Keras

Responden memberikan tanggapan terhadap Aspek Perangkat Keras dengan nilai minimum responden sebesar 3 sedangkan nilai maksimum senilai 12. Nilai rata-rata (*mean*) Aspek Perangkat Keras adalah 11,37 dengan standar deviasi sebesar 1,762. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti bahwa dari skala 1-4, range jawaban responden pada Aspek Perangkat Keras terletak antara selalu dan sering. Sedangkan standar

deviasi sebesar 1,762 menunjukkan bahwa penyimpangan data tersebut kecil karena standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata. Berdasarkan hasil rekapitulasi skor tanggapan dari jawaban responden menunjukkan bahwa Aspek Perangkat Keras masuk ke dalam kategori sangat baik.

Aspek Sumber Daya Manusia (*Brain Ware*)

Hasil penilaian responden terhadap Aspek Sumber Daya Manusia menghasilkan nilai minimum responden sebesar 8 dan nilai maksimum responden sebesar 16. Nilai rata-rata (*mean*) Aspek Sumber Daya Manusia 15,29 dengan standar deviasi sebesar 1,465. Berdasarkan hal tersebut, Nilai rata-rata tersebut menunjukkan dari skala 1-4, range jawaban responden pada Aspek Sumber Daya Manusia terletak antara selalu dan sering. Sedangkan standar deviasi sebesar 1,465 menunjukkan bahwa penyimpangan data tersebut kecil karena standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata. Dengan demikian maka untuk Aspek Sumber Daya Manusia masuk ke dalam kategori sangat baik.

Kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB)

1. Kesadaran Wajib Pajak kendaraan bermotor yang masih perlu ditingkatkan, kepemilikan kendaraan seyogianya diiringi kesadaran dalam membayar pajaknya
2. Masyarakat masih merasa lebih nyaman saat membayar pajak langsung mendapat bukti fisik pembayaran, dibanding notifikasi dari aplikasi bahwa pajak sudah dibayar.
3. Masyarakat pada umumnya masih belum terbiasa dengan pembayaran non tunai, sehingga merasa ragu saat membayar menggunakan aplikasi, merasa seakan belum membayar pajak.
4. Masyarakat lebih suka bertatap muka secara langsung dengan petugas, sehingga merasa lebih yakin bahwa kewajiban perpajakannya telah dilakukan.

KESIMPULAN

Kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Bapenda Jabar dengan melakukan modernisasi pajak kendaraan bermotor melalui inovasi pembayaran diantaranya Aplikasi Sambara, E-Samsat, Samsat gendong, Samsat Keliling, Samsat Corner, Samsat Drive-Thru, Samsat Samsat Outlet, Tabungan Samsat, Samsat Masuk Desa, Samsat 3 Provinsi, dll.
2. Masih terdapat kendala pada masyarakat wajib Pajak kendaraan bermotor yaitu belum adanya mindset online payment dan belum adanya budaya yang kuat

terhadap pembayaran cashless, sehingga masyarakat masih dominan melakukan pembayaran secara langsung dengan bertemu petugas pajak dan membayar secara tunai atau kas.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmanto, Aresta.(2016). Optimalisasi Sumber PAD dalam pelaksanaan Otda di Kab.Kutai Timur. e-Journal ad.Bisnis FISIP Universitas Mulawarman.15-25
- Huberman, Mathew Miles.(2002). Analisis Data Kualitatif tentang Metode-metode Baru.35-38
- Ismawan,Indra (2001). Memahami Reformasi Perpajakan. 37-39
- Pandiangan,Liberty (2008). Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan berdasarkan UU terbaru. 23
- Peraturan Daerah no.13(2011). Peraturan Daerah no.13 tentang Pajak Daerah.Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- Rahayu,Siti Kurnia (2010). Perpajakan Indonesia. *Konsep dan Aspek Formal*,66-68
- Samudra,Azhari (2015). Perpajakan di Indonesia. 77-81
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.86-89
- KBBI. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses dari <http://kbbi.web.id/patuh>, pada 15 Juli 2020
- Wikipedia. (2020) <http://id.wikipedia.org/wiki/optimasi>. diakses 20 Juni 2020.